

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Batasan Penelitian.....	8
1.5.1 Batasan Substansi	8
1.5.2 Batasan Lokasi.....	8
1.5.3 Batasan Temporal.....	8
1.6 Keaslian Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
2.1 Pertambangan.....	13
2.2 Tata Ruang dalam Perspektif <i>Multi-Level Governance</i>	15
2.2.1 Pertambangan dalam lingkup Perencanaan Penataan Ruang	17
2.2.2 Pertambangan dalam lingkup Pemanfaatan Ruang	18
2.2.3 Pertambangan dalam lingkup Pengendalian Pemanfaatan Ruang..	20
2.3 Reformasi perizinan melalui UUCK dan OSS	21
2.3.1 Online Single Submission (OSS)	21
2.3.2 Perizinan Tata Ruang untuk kegiatan Pertambangan.....	23
2.4 Tinjauan Studi Terdahulu	26
2.4.1 Masalah Klasik Perizinan dan Optimisme Awal OSS	26

2.4.2	Kritik Hukum dan Institusional terhadap Sentralisasi.....	29
2.4.3	Dinamika Implementasi Digital dan Friksi Kebijakan.....	31
2.4.4	Strategi Adaptasi Birokrasi: Diskresi di Era Digital	33
2.5	Kerangka Teori	35
2.5.1	Teori Beban Administratif.....	35
2.5.2	Transformasi Birokrasi: Dari Street-Level ke Screen-Level.....	37
2.5.3	Respons Birokrasi dan Strategi Koping (Coping Strategy).....	39
2.5.4	Politisasi Otoritas dan Kontestasi Logika dalam Tata Kelola	42
2.5.5	Strategi Perencanaan dalam Ketidakpastian.....	43
2.5.6	Tata Kelola Adaptif (Adaptive Governance)	44
2.6	Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN		50
3.1	Pendekatan Penelitian	50
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.2.1	Lokasi Penelitian	51
3.2.2	Waktu Penelitian	51
3.3	Fokus Penelitian.....	52
3.4	Informan Penelitian.....	52
3.5	Jenis dan Teknis Pengumpulan Data	54
3.5.1	Data Primer.....	54
3.5.2	Data Sekunder	55
3.6	Teknik Analisis Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN		58
4.1	Kondisi Umum Kabupaten Magelang	58
4.1.1	Karakter Fisik Daerah Penelitian.....	58
4.1.2	Karakteristik Sosial-Ekonomi	62
4.1.3	Kerangka Regulasi Penataan Ruang Pertambangan di Kabupaten Magelang	64
4.2	Pertambangan Sebagai Salah Satu Aktor Ekonomi Lokal.....	70
4.2.1	Potensi dan Sebaran Lokasi Pertambangan.....	70
4.2.2	Profil Pelaku Usaha Tambang dan Dampak Ekonomi	73
4.2.3	Isu Lingkungan dan Sosial	75

4.3	Perubahan tata kelola pertambangan Sebelum dan Sesudah UUCK	78
4.3.1	Tata Kelola sebelum UUCK.....	78
4.3.2	Tata Kelola setelah UUCK.....	80
BAB V PEMBAHASAN		83
5.1	Dinamika Tata Kelola dan Kendala Implementasi di Daerah	83
5.1.1	Perubahan Kewenangan Perizinan: Tarik-Menarik antara Daerah dan Pusat	83
5.1.1.1	Dampak Sentralisasi terhadap Kewenangan Daerah.....	83
5.1.1.2	Perubahan Mekanisme Perizinan Tata Ruang: Dari ITR Menuju KKPR	86
5.1.2	Kendala Struktural dalam Ekosistem OSS	99
5.1.2.1	Ketegangan Hubungan Vertikal: Standarisasi Pusat yang Mengabaikan Kondisi Daerah	100
5.1.2.2	Fragmentasi Sistem Horizontal	106
5.1.3	Benturan Cara Pandang: Kebingungan Pelaksana di Tingkat Bawah	111
5.1.3.1	Keraguan Birokrasi dalam Menjalankan Sistem Baru ...	111
5.1.3.2	Ketidaksiapan Pelaku Usaha Lokal.....	115
5.1.4	Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya Daerah	118
5.2	Respons Birokrasi: Praktik Adaptasi dan Motivasi di Balik Ketidakefektifan.....	120
5.2.1	Langkah Adaptasi di Lapangan: Cara Birokrasi Mengatasi Kesenjangan Sistem.....	120
5.2.1.1	Klinik Pra-OSS: Praktik <i>Soft Planning</i> di Ruang Transisi	122
5.2.1.2	Verifikasi untuk Mengisi Kekosongan Validitas Digital.....	127
5.2.1.3	Dinamika Kolektif FPR.....	129
5.2.1.4	Strategi Pelaku Usaha: Navigasi Informal dan Pemanfaatan Perantara	132
5.2.2	Motivasi dan Rasionalitas Aktor	134
5.2.2.1	Rasionalitas Defensif: Operasionalisasi Asimetri Teritorial dan Pendekatan Lunak	135

5.2.2.2	Tekanan dari Dalam: Taat Aturan atau Mengikuti Logika Teknis.....	138
5.2.2.3	Tekanan dari Luar: Persetujuan Warga di atas Izin Legal.....	141
5.2.2.4	Motivasi Pelaku Usaha.....	144
5.3	Implikasi dan Kerangka Model Tata Kelola.....	147
5.3.1	Dampak Multidimensi Implementasi Kebijakan.....	147
5.3.1.1	Implikasi terhadap Kepastian Ruang dan Kinerja Ekonomi Daerah.....	147
5.3.1.2	Melemahnya Fungsi dan Peran Lembaga Pemerintah di Daerah	149
5.3.1.3	Antara Beban Diskresi Saat Ini dan Risiko Kekakuan Sistem di Masa Depan.....	151
5.3.2	Kerangka Model Tata Kelola Adaptif di Tingkat Lokal	154
5.3.2.1	Prasyarat Fondasional: Keterbukaan dan Integrasi Real-Time Data Spasial Lintas Sektor	155
5.3.2.2	Tiga Pilar Komponen Utama Model Adaptif.....	155
5.3.2.3	Mekanisme Operasional: Dua Fase Intervensi.....	158
5.4	Diskusi Teoretik.....	162
5.4.1	Reevaluasi Sentralisasi: Ilusi Efisiensi dalam Tata Kelola Bertingkat	163
5.4.2	Paradoks Birokrasi Digital: Ilusi Teknokratik dan Friksi Implementasi	167
5.4.3	Mendudukan Kembali Makna Diskresi: Peran Vital Petugas di Balik Layanan Digital	173
5.4.4	Pembuktian Empiris Mekanisme Kopling Kelembagaan sebagai Akselerator	175
BAB VI KESIMPULAN.....		178
6.1	Kesimpulan	178
6.2	Implikasi Penelitian	180
6.3	Saran	181
6.3.1	Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.....	181
6.3.2	Saran untuk Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Terkait).....	182

6.3.3	Saran untuk Peneliti Selanjutnya.....	183
6.4	Keterbatasan Penelitian.....	184
DAFTAR PUSTAKA		186
LAMPIRAN.....		192
1.	Pedoman Wawancara	xiv
2.	Matriks Kondensasi Data	xvi
3.	Analisis Basis Ekonomi Sektor Pertambangan (LQ & <i>Shift-Share</i>)	xx
4.	Matriks sebaran perizinan berusaha pertambangan di Kabupaten Magelang (per 12 Juni 2025)	xxiv
5.	Dokumentasi Observasi Partisipatif	xxvii